

Judul : Bentuk timwas bersama, pemerintah & Asosiasi sepakat zero ODOL
Tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Bentuk Timwas Bersama Pemerintah & Asosiasi Sepakat Zero ODOL

PEMERINTAH bersama pemangku kepentingan logistik nasional resmi menetapkan kebijakan *Zero Over Dimension Over Loading* (Odol) akan diberlakukan penuh mulai 2027.

Kesepakatan ini dicapai usai pertemuan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), DPR, Aliansi Pengemudi Independen (API) dan pengusaha logistik di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Pertemuan yang dilakukan tertutup ini turut dihadiri Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi V DPR Lazarus, Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda dan Ketua Umum Asosiasi Penge-



TEDDY KRISON/SARUKAT/REDAKSI RUMAH

mudi Independen (API) Suroso. Dudy Purwagandhi menyambut baik kesepakatan final yang diinisiasi DPR. Eks Komisaris PLN ini mengungkapkan, diskusi yang berjalan dari hati ke

hati telah melahirkan komitmen bersama yang kuat.

"Kami sudah berbicara dari hati ke hati dan menyepakati perlunya komitmen bersama untuk melaksanakan Zero Odol," kata Dudy,

BERI KETERANGAN:

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi (ketiga kanan) bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (jengah), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Jaya (kedua kanan), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (ketiga kiri), Ketua Komisi V DPR Lazarus (kedua kiri), Wakil Ketua Komisi V DPR Robert Rouw (kiri) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengemudi Independen (DPN-API) Suroso (kanan), memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Dudy berjanji akan segera menindaklanjuti poin-poin kesepakatan agar target Zero Odol di 2027 bisa tercapai tanpa merugikan pihak manapun.

"Beberapa hal yang harus

kami siapkan akan kami segera laksanakan," ujarnya.

Dia mengatakan, proses transisi nantinya akan dilengkapi dengan pengaturan teknis, sosialisasi, dan evaluasi bertahap. Namun, pemberlakuan regulasi Zero Odol bukan hanya soal penegakan hukum tapi juga tentang membangun sistem logistik nasional yang kuat, aman dan berdaya saing.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hasil pertemuan telah disepakati akan dibentuknya tim teknis untuk merumuskan kebijakan Zero Odol.

"Kami telah bersepakat, baik dengan Pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman pengemudi truk," jelasnya. ■KPI